

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA**

**(studi kasus perkara 535/Pid.B/2013/PN.Pdg )**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



**Oleh**

**JENNI RAMADHAN**

**1520123086**

**Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H.,M.H**
- 2. Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA**

(studi kasus perkara pidana nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)

Peranan Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan umum yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam hal membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang sah baik dibuat oleh Notaris maupun dibuat di hadapan Notaris. Akan tetapi dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dipanggil pihak penyidik untuk menjadi saksi bahkan tersangka terkait dengan akta otentik. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UUN dalam kaitannya dengan aspek pidana, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. dalam UUN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris, dan Bagaimana akibat hukum atas akta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan di dalam UUN dan UU Perubahan atas UUN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana notaris, pemalsuan surat, akta otentik.

## *ABSTARCT*

### **Criminal Responsibility Notary Whose Joined Doing Criminal Falsification Power Of Attorney Letter**

**(Case Study of Criminal Case No. 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)**

The role of notary in the service sector is as an official authorize by the state to serve the public in the civil field, especially the making of authentic deed. Notary's position is a general position desired by legislation in order to assist the public in making an authentic deed as a legitimate written evidence either made by notary, or made in front of notary. However, in carrying out its position, notary is often called the investigator to be a witness, even a suspect associated with authentic deed. Notary is required to be responsible for the deed he has made, sometimes the deed made before the notary contains false information, desepition and even unrighteousness. In Law No. 2 Year 2014 concering Amandement to Law No. 30 of 2004 concering Notary's Position has not regulated the existence of legal sanction of violation against Article 15 of Law on Amandement of Notary's Position Law in relation to criminal aspect, where its estimate is if notary doesn't fulfill provisions the article shall result in fraudulent acts of letters or falsified deeds as intended in Articles 263, 264 and 266 of the Indonesian Criminal Code Articles 55 of Criminal Code, which may result in harm to the interested parties. In the Notary's Position Law also doesn't regulate the criminal liability of a notary from deed he has made based on data and information fabricated by the parties. The formulation of the problem of this research is how the form of criminal liability notary and how the legal effect on the deed. This research is normative law research if seen from the form, this research is included in the form of descriptive analytical research, by using approach of case. The result of the research shows that in Notary's Position Law and Notary's Position Law changes doesn't regulate the existence of criminal sanction. In practice it's found that the violation of the sanction is then qualified as a crime committed by a notary. Notary cannot be held liable if there is a loss to one of the parties, because notary only records what the parties have submitted to the deed. In other words, what the notary can be accountable is if fraud or trickery is sourced from the notary himself.

**Keywords: criminal responsibility, notary, Falsification of letter, authentic deed.**